

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Pelaksanaan otonomi daerah dikabupaten/kota provinsi Jawa Tengah adalah salah satu daerah yang melakukan penerapan kemandirian daerah juga diatur dalam undang-undang No 32 tahun 2004, pengelolaan dan pertanggung jawaban daerah atas laporan keuangan harus dikelola dengan baik, tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, apabila laporan keuangan dikelola secara baik dan sesuai peraturan yang ada maka dari itu akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan daerah.

Kinerja Keuangan daerah merupakan suatu hasil pencapaian target yang ingin dicapai supaya daerah tersebut dapat bersaing dengan daerah lain, kinerja keuangan yang baik tingkat efisiensi, efektifitas, akuntabel, jujur dan demokratis dalam pemerintahan tingkat kinerja keuangan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar penerimaan pendapatan asli daerah, karena didaerah provinsi Jawa Tengah tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD masih rendah, hal tersebut akan mempengaruhi lemahnya aparatur daerah karena kurangnya pengaawasan maka akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan juga rendah.

Namun pada kenyataannya berdasarkan kutipan dari media cetak Jawa Pos radar Semarang, menyebutkan bahwa provinsi jawa tengah sangat rendah pengelolaan keuangannya, sebagaimana yang diucapkan oleh bapak Gubernur Ganjar Pranowo mencerminkan lemahnya aparatur pemerintah Jawa Tengah

dalam mekanisme pengelolaan keuangan di daerah, menandakan bahwa lemahnya keuangan yang ada di daerah juga menjadi penyebab besarnya potensi terjadinya korupsi dalam proses pengelolaan.

Pengelolaan keuangan di Jawa Tengah belum mendapat sebutan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di dalam bagian dari pengelolaan keuangan daerah, tentunya hal ini menggambarkan bahwa sistem manajemen pengelolaan keuangan kabupaten/ kota provinsi Jawa Tengah masih sangat buruk. Selanjutnya temuan bukti yang lain yaitu masih banyaknya sampah yang menumpuk di beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, hal ini berarti mencerminkan bahwa kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah kebersihannya masih kurang, karena kurangnya petugas kebersihan maka tenaga kerja dinas kebersihan harus ditambah, tentunya hal ini juga memerlukan biaya tambahan untuk menjadikan provinsi Jawa Tengah dari tumpukan sampah dan menjadi kota yang bersih. Dan juga banyaknya jalan yang rusak antar kecamatan, buruknya kondisi jalan, bisa berdampak pada tingkat kemiskinan karena akses perekonomian warga menjadi tidak lancar, pendidikan yang masih sangat minim, karena kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan belum memadai, dll.

Hasil temuan bukti-bukti bisa terlihat jelas dari kinerja keuangan di pemerintah daerah yang masih sangat rendah dan dapat dinilai belum baik. Pengukuran kinerja juga dapat menambah tingkat efisiensi, keefektifan dalam melakukan kinerja, serta pengurangan produktifitas pada lembaga sektor publik. Pengukuran pencapaian kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang

mempunyai pengaruh terhadap tingkat kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta mengevaluasi organisasi. Pengukuran tingkat kinerja akan memberikan reaksi sehingga terjadi upaya usaha yang berkepanjangan supaya dapat mencapai tujuan di masa yang mendatang.

Dalam pengambilan keputusan bisa mempengaruhi meningkatnya kualitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dengan mengambil keputusan yang berkualitas akan memajukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hal melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah, maka daerah harus dapat mengenali potensi yang ada di daerah tersebut dan melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pengeluaran pemerintah daerah maka dari itu daerah harus mengali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan jika Pendapatan Asli daerah besar maka akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik investor maka secara bersamaan akan memberikan keuntungan untuk daerah dan juga memberikan kemajuan daerah tersebut, penerimaan daerah juga berasal dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum).

Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kegiatan yang bersifat untuk kepentingan daerah tersebut, DAU digunakan untuk keperluan daerah yang bersifat umum. Sedangkan DAK digunakan untuk keperluan daerah yang bersifat khusus, dana tersebut diberikan sesuai potensi daerah tersebut.

Tidak hanya saja pengelolaan keuangan yang buruk, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten/ kota provinsi Jawa Tengah belum juga mendapatkan fungsi pengawasan secara maksimal peran Legislatif (DPRD) untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, disini diterapkan fungsi pengawasan yang merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut di atas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintah daerah diharapkan warga supaya bisa lebih bisa menelusuri keberadaan keuangan daerah itu berasal, agar dapat memuaskan atau mencukupi kebutuhan yang menjadi pembiayaan pemerintahan dan pengembangan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan PAD yang makin besar seiring berjalannya semakin banyaknya kekuasaan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pemindahan personil, peralatan, serta pembiayaan dan pengolahan ke daerah-daerah yang berjumlah sangat besar.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Githa Mayora (2015) dengan hasil penelitian yang dilakukan yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang

dilakukan Dhia cherrya (2012), Renas Dul (2014), Ebit Julitawati (2012) terhadap kinerja keuangan. Memerlihatkan bahwa hasil secara serempak Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapatan asli daerah yang diperoleh disetiap daerah berbeda-beda hal tersebut yang akan mempengaruhi tingkat perkembangan dan pembangunan daerah.

Begitu juga dengan Dana alokasi umum (DAU) menurut hasil penelitian Abdullah Febriansah (2013) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan, sedangkan menurut hasil penelitian Ebit Julitawati (2012), Nuansa Megga Okky (2012) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat kebutuhan dana yang berbeda disetiap daerah yang diberikan setiap tahunnya untuk keperluan pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi khusus (DAK) pada penelitian Abdullah Febriansah (2013) menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julitawati (2012), Wan Vidi Rukmana (2015) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat DAK disetiap daerah dan kebutuhan yang diperlukan disetiap daerah, dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang menjadi

urusan daerah terutama prasarana dan sarana fisik didaerah terpencil, pembangunan jalan,dll.

Penelitian ini merupakan penelitian replika penelitian yang dilakukan Abdullah Febriansah (2013) penelitian ini mengombinasikan penelitian Julitawati Ebit (2012) dan Dhia Cherrya (2012)

Perbedaan penelitian ini menambah variabel yaitu Ukuran Legislatif. (DPRD) yaitu DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.anggota DPRD harus bisa memperlihatkan mengenai seberapa besar tingkat pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa besar penghasilan yang akan diterima daerah. Besarnya jumlah anggota DPRD diharapkan bisa memperluas pengawasan terhadap pemerintah daerah maka dari itu akan mengakibatkan dampak melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar anggota legislatif (DPRD) diharapkan dapat menaikkan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan, Menurut Gita Mayora (2015). Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Ukuran Legislatif (DPRD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
- 2 Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah?

- 3 Bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah?
- 4 Bagaimana Ukuran Legislatif (DPRD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah .
- 2 Untuk mendapatkan bukti empiris Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.
- 3 Untuk mendapatkan bukti empiris Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. .
- 4 Untuk mendapatkan bukti empiris Ukuran Legislatif (DPRD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak berikut:

1. Aspek Teoritis

Dalam Ilmu Akuntansi dapat menambah wawasan tentang pengetahuan Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Lembaga Legislatif (DPRD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Aspek Praktis

Bagi Responden yaitu Pemerintah daerah dapat mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pemerintah dalam melakukan pengelolaan anggaran tentang Laporan Keuangan Khususnya PAD, DAK, DAU, dengan melalui pengawasan Ukuran legislatif (DPRD).Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK dan pencapaian target anggaran Pendapatan Asli daerah.